

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PEREMPUAN MANGKUNEGARAN PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL

#### A. Praja Mangkunegaran

Berdirinya Praja Mangkunegaran ditandai dengan dilaksanakannya perjanjian Salatiga antara Raden Mas Said, Belanda, dan Sunan Paku Buwono III tahun 1757. Perjanjian tersebut menyepakati beberapa hal yang meliputi:

1. Raden Mas Said diangkat menjadi Pangeran Miji, yang berkedudukan di bawah Sunan. Raden Mas Said bergelar Pangeran Adipati Mangkunegara.
2. Raden Mas Said mendapatkan tanah sebesar 4000 *karya*,<sup>1</sup> yang terletak di Keduwang, Laroh, Matesih dan Gunung Kidul.
3. Raden Mas Said harus bersumpah setia kepada Sunan, Sultan, dan Belanda. Raden Mas Said juga harus tunduk kepada perintah raja. Ia juga harus tinggal dan berkedudukan di ibukota Surakarta.<sup>2</sup>

Berdasarkan perjanjian Salatiga tersebut disepakati bahwa Raden Mas Said mendapat tanah *lungguh* (*apanage*) seluas 4000 *karya* . Tanah *apanage* yang diberikan kepada Raden Mas Said merupakan tanah yang pernah dikuasai oleh Raden Mas Said. Wilayah awal Praja Mangkunegaran disebut sebagai desa *Babok* (desa inti atau desa induk).

Luas dan nama-nama wilayah yang ada di bawah Pemerintahan Praja

---

<sup>1</sup> Luas satu karya sekitar 7.096,5 meter atau sama dengan satu *bau* (3/4 hektar). Lihat Wasino, 2008, *Kapitalisme Bumi Putra: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara.

<sup>2</sup> A.K.Pringgodigdo, *Lahir Serta Tumbuhnya Praja Mangkunegaran*, Surakarta: Rekso Pustaka, 1938, hlm 8.

Mangkunegaran pada tahun 1757 dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

**Tabel 1**  
**Nama dan Luas Wilayah Desa *Babok* Mangkunegaran**  
**Tahun 1757**

NO.	NAMA WILAYAH	LUAS (JUNG)	LUAS (KARYA)
1	Keduang	141	564
2	Laroh	115,5	462
3	Matesih	218	872
4	Wiraka	60,5	242
5	Haribaya	82,5	330
6	Hanggabayan	25	100
7	Sembuyan	133	532
8	Gunung Kidul	71,5	286
9	Pajang (Sebelah selatan Jalan Surakarta-Kartasura)	58,8	235,2
10	Pajang (sebelah utara Jalan Surakarta-Kartasura)	64,5	258
11	Mataram (Pertengahan Yogyakarta)	64,5	258
12	Kedu	8,5	34
	<b>JUMLAH</b>	<b>975,5</b>	<b>3.918</b>

(Sumber: Wasino, 2008, *Kapitalisme Bumi Putra: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, hlm 13).

Di bawah pemerintahan Mangkunegara II (1756-1835), wilayah praja Mangkunegaran mengalami penambahan wilayah sebanyak dua kali. Pada tahun 1813, Praja Mangkunegaran mendapat tambahan tanah sebesar 240 *jung*<sup>3</sup> atau 1000 *karya* sehingga luasnya menjadi sekitar 5.000 *karya*. Wilayah tambahan ini tersebar di sejumlah tempat, yaitu, yang terletak di Keduwang (72 *jung* ),

<sup>3</sup> Wasino, *op.cit.*, hlm. 14.

Sembuyan (12 *jung*), Mataram (2,5 *jung*), Sukawati bagian barat (28,5 *jung*) dan daerah di lereng gunung Merapi bagian timur (29,5 *jung* ). Tambahan tanah ini sebagai hadiah karena jasa Mangkunegara II yang mengirimkan prajuritnya membantu Inggris dalam konflik melawan Sultan Sepuh di Yogyakarta dan Susuhunan Pakubuwana IV.<sup>4</sup>

Penambahan kedua terjadi pada tahun 1830, masih dalam Pemerintahan Mangkunegara II. Ketika itu, wilayah Mangkunegaran bertambah luasnya 120 *jung* atau 500 *karya* lagi sehingga luas wilayah secara keseluruhan menjadi sekitar 5.500 *karya* atau 3.850 hektar. Tambahan wilayah kedua ini terletak di Sukawati bagian utara. Penambahan wilayah ini sebagai hadiah atas jasa Sri Mangkunegara mengirimkan prajuritnya membantu Belanda dalam menumpas perlawanan Diponegoro. Berbeda dengan tanah-tanah *babok* yang umumnya tanah yang kurang subur, tanah-tanah tambahan ini terdiri dari tanah-tanah yang subur di lembah Bengawan Solo.

Oleh Karena banyak lokasi tanah Mangkunegaran yang berada dalam administrasi Sunan dan Sultan, maka pada tahun 1831 diadakan saling tukar wilayah untuk mempermudah kontrol administrasi terhadap wilayah tersebut. Adapun pertukaran wilayah itu antara lain: (1) Tanah Mangkunegaran sebanyak 64 *jung* yang terletak di Gunung Kidul bagian barat, yaitu, Ponjong dan Semanu ditukar dengan tanah Sultan Yogyakarta yang terletak di Sembuyan Selatan (sebelah timur Surakarta); (2) Tanah-tanah di wilayah *Gubernemen*, yakni Kedu (8,5 *jung*), dan tanah Kalitan (Majak, Ketinggi, dan Tuk Sanga) diserahkan pada

---

<sup>4</sup> *Ibid* hlm 22.

Pemerintah Belanda dan pihak Mangkunegaran mendapatkan ganti rugi sebesar f 1.297,98.<sup>5</sup>

Pada masa Pemerintahan Mangkunegara III, tepatnya pada tahun 1847, secara administrasi Praja Mangkunegaran dibagi menjadi tiga daerah *Onderregentschap* yang meliputi: Wonogiri (Laroh, Hanggabayan, Keduwang), Karanganyar (Sukawati, Matesih, Haribaya) dan Malangjiwan. Sedangkan pada masa Mangkunegara IV, tepatnya pada tahun 1875 terjadi perubahan lagi dengan dihapuskannya *Onderregentschap* Malangjiwan dan kemudian dibentuk *Onderregentschap* Baturetno yang wilayahnya meliputi tanah Wiraka dan Sembuyan. Ini berarti pada masa Mangkunegara IV, Praja Mangkunegaran terbagi menjadi tiga wilayah meliputi Wonogiri, Karanganyar, dan Baturetno.<sup>6</sup>

Pada masa Pemerintahan Mangkunegara V, tepatnya pada tahun 1891 *Onderregentschap* Baturetno dihapuskan dan wilayahnya digabungkan dengan *Onderregentschap* Wonogiri. Saat pemerintahan Mangkunegara VI tepatnya tahun 1903 terjadi perubahan wilayah lagi, yaitu dibentuknya *Onderregentschap* Kota Mangkunegaran sehingga wilayah Mangkunegaran pada tahun tersebut terbagi menjadi tiga *Onderregentschap*, yaitu: Kota Mangkunegaran, Karanganyar, dan Wonogiri ditambah *enclave* Ngawen.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>6</sup> Sutrisno Adiwardoyo, *Pertumbuhan Kadipaten Mangkunegaran Sampai Masuknya ke Provinsi Jawa Tengah*, Surakarta: IKIP, 1974, hlm 30.

<sup>7</sup> Wasino, *Kebijaksanaan Pembaharuan Pemerintahan Praja Mangkunegaran: Akhir Abad XIX-Pertengahan Abad XX*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1994, hlm 54.

Pada awal abad XX batas-batas antara daerah Mangkunegaran dengan daerah swapraja lainnya semakin dipertegas, terutama dengan menghilangkan daerah-daerah *enclave*.<sup>8</sup>

Wilayah Mangkunegaran meliputi daerah seluas 2815,14 km<sup>2</sup>, yang meliputi lereng barat dan selatan Gunung Lawu yang meluas sampai daerah hulu Bengawan Solo menuju Gunung Kidul. Bagian selatan dari praja ini membentang pada bagian timur gunung Sewu yang sangat tandus hingga Samudra Hindia. Di sebelah barat, daerahnya sebagian menuju barat melalui dataran rendah Bengawan Solo sampai pada ujung kaki Gunung Merapi dan Merbabu yang keadaan tanahnya sangat subur.

Pada tahun 1917 Praja Mangkunegaran masih tetap membawahi 3 kabupaten yaitu kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Kota Mangkunegaran. Pada tahun 1929 terjadi perubahan kembali, Praja Mangkunegaran menghapus Kabupaten Kota Mangkunegaran. Wilayah yang semula Kabupaten Kota Mangkunegaran digabungkan dengan wilayah Kabupaten Karanganyar, sehingga pada waktu itu Praja Mangkunegaran membawahi dua kabupaten, yaitu, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri.<sup>9</sup>

Penggabungan Kabupaten Kota Mangkunegaran dengan Kabupaten Karanganyar tersebut dilakukan oleh Mangkunegara VII dalam rangka penghematan anggaran pemerintahan dikarenakan saat itu dampak-dampak krisis ekonomi yang terjadi di seluruh penjuru dunia sudah mulai dirasakan di Praja

---

<sup>8</sup> *Enclave* adalah sebidang tanah yang berada di wilayah orang lain atau daerah kantong.

<sup>9</sup> Wasino, *op.cit*, 2008, hlm. 52.

Mangkunegaran.

Perubahan ini tidak berlangsung lama, setahun kemudian diadakan perubahan lagi, yaitu: dengan dihidupkannya lagi Kabupaten Kota Mangkunegaran. Bekas daerah kabupaten Karanganyar menjadi daerah Kabupaten Kota Mangkunegaran.<sup>10</sup>

Tatanan pemerintahan Praja Mangkunegaran berkembang sampai tingkat desa. Hal ini terlihat dengan dibentuknya susunan desa. Pada tahun 1920 praja Mangkunegaran memiliki 561 desa, sedangkan pada tahun 1926 telah memiliki sebanyak 738 desa. Dalam perkembangannya sampai tahun 1933, Praja Mangkunegaran telah memiliki seluruhnya 754 desa dan kampung. Kemudian diadakan penggabungan kelurahan-kelurahan tersebut. Sampai tahun 1939, Praja Mangkunegaran telah membentuk 154 kalurahan baru.<sup>11</sup>

Reorganisasi desa-desa tersebut dilakukan Mangkunegara VII untuk memperkuat moral masyarakat desa agar tidak jatuh karena masuknya pengaruh dunia luar terhadap desa-desa di Mangkunegaran. Mangkunegara VII yang memerintah tahun 1916-1944 memiliki harapan agar desa tetap bertahan berdasarkan moral lama.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Wasino, *op.cit*, 1994, hlm. 54

<sup>11</sup> Mohamad Daljyono, *Ketataprajaan Mangkunegaran*, Surakarta: Rekso Pustaka, 1977, hlm.1 10.

<sup>12</sup> Wasino, *op.cit*, 2008, hlm 124.

## **B. Kondisi Kaum Perempuan Mangkunegaran**

Pada masa Pemerintahan Mangkunegara VII, kondisi perempuan sudah mulai menunjukkan perubahan yang berarti. Meskipun masih terdapat perbedaan pandangan mengenai status laki-laki dan perempuan seperti yang lazim berlaku waktu itu. Perbedaan pandangan mengenai status laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sudah terbentuk sejak lama. Demikian pula kosmologi Jawa menganut pandangan patriarki yang lebih sering menempatkan perempuan sebagai subordinat laki-laki.

Pandangan ini diperkuat dan direkonstruksi secara sosial dan kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui doktrin agama, hal ini dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang seolah-olah bersifat alami yang tidak bisa diubah lagi sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.<sup>13</sup> Dalam pandangan ini, laki-laki dianggap sebagai pemimpin dan perempuan harus tunduk-patuh pada laki-laki. Pandangan ini lambat laun menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah, yang hanya diberi tugas-tugas domestik karena kodratnya untuk hamil, melahirkan dan menyusui. Perempuan kemudian hanya dianggap mampu menjalankan tugas-tugas domestik untuk mengurus anak dan rumah tangga, sedangkan laki-laki dianggap sebagai makhluk yang lebih kuat dan layak memimpin sehingga laki-laki dianggap memiliki kedudukan sosial dan peranan yang lebih tinggi daripada perempuan.

---

<sup>13</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1945, hlm. 9.

Pandangan ini juga berpengaruh terhadap bidang pendidikan. Pendidikan bagi perempuan dianggap kurang penting dibandingkan pendidikan bagi laki-laki. Akibatnya, banyak perempuan yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Padahal pendidikan merupakan salah satu syarat bagi kemajuan dan peningkatan peran perempuan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, dibutuhkan pendidikan yang menyeluruh dari semua aspek kehidupan dan dari berbagai bidang untuk meningkatkan kualitas diri dan membuat kaum perempuan lebih terdepan. Hal ini sesuai dengan corak pergerakan perbaikan kedudukan dalam setiap keluarga dan setiap perkawinan.

Pandangan serupa juga berlaku bagi kaum perempuan di wilayah Praja Mangkunegaran, Surakarta pada masa pergerakan nasional. Akhir abad ke-19, rakyat Indonesia dari kalangan atas maupun kalangan bawah mulai melakukan perbaikan-perbaikan pendidikan secara menyeluruh. Karena menurut mereka perubahan tidak dapat hanya menyangkut laki-laki tanpa melihat perbaikan golongan perempuannya. Walaupun pada saat itu kedudukan sosial perempuan disepelkan, namun peranannya sebagai isteri di dalam keluarga maupun sebagai ibu yang memberikan fungsi dan hak hidup kepada anak-anaknya di dalam rumah tangga dianggap sangat penting bagi kemajuan bangsa.<sup>14</sup> Jika perempuan mendapat pendidikan yang layak, maka status perempuan menjadi lebih tinggi dalam lingkungan sosial. Dengan kata lain, perempuan menjadi lebih maju dalam

---

<sup>14</sup>Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional: dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1994, hlm. 27.



berpikir sehingga mampu menghilangkan paham “kolot” yang menyudutkan perempuan.

Masyarakat tradisional pada umumnya menganggap status perempuan berada di bawah kaum laki-laki. Kaum perempuan tidak diberi kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Perempuan tidak diberi kesempatan untuk maju, karena adanya norma-norma yang mengikat kebebasan bergerak dalam berbagai bidang. Kaum perempuan hanya dipersiapkan menjadi calon pelayan suami yang harus bekerja di dalam rumah.<sup>15</sup> Padahal dalam agama Islam Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama, sebagai makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Yang membedakan kualitas manusia bukanlah jenis kelamin, tetapi yang membedakan manusia adalah hati dan perilakunya yang paling taqwa.

Di sisi lain, permulaan abad ke-20 seluruh Asia yang sebagian besar menjadi tanah jajahan negara-negara Barat mulai dilanda gelombang nasionalisme. Kemenangan Jepang atas Rusia dalam pertempuran di laut Tsusyima pada tahun 1904 membangkitkan rasa percaya diri terhadap bangsa-bangsa Asia, termasuk Indonesia. Sebagai bentuk semangat kebangkitan itu muncullah organisasi nasional yang pertama “Boedi Oetomo” (1908), yang tak lama kemudian disusul oleh organisasi perempuan pertama “Poetri Mardika” (1912). Sadar bahwa pendidikan merupakan kunci bagi kemajuan perempuan dan bangsa, “Poetri Mardika” memusatkan programnya pada pendidikan bagi gadis-

---

<sup>15</sup>Mayling Oey Gardine, *Perempuan Indonesia Dulu dan Kini*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996, hlm. 293.

gadis. Bantuan penuh diperoleh dari “Boedi Oetomo” karena pemimpin pergerakan nasional meyakini bahwa tanpa partisipasi perempuan dan tanpa pendidikan, perjuangan sulit mendapatkan keberhasilan.

Munculnya gerakan-gerakan nasional ini juga membawa perubahan bagi pandangan hidup orang Jawa. Kehidupan keluarga Jawa awal abad ke-20 dikenal sebagai periode perubahan, yaitu, suatu perubahan masyarakat yang menyentuh hampir semua aspek pendidikan, mulai dari politik, ekonomi hingga budaya.<sup>16</sup> Berbagai perubahan tersebut tentu tidak dapat dilepaskan dari kondisi sebelumnya, yaitu ketika terjadi perubahan pengelolaan masyarakat dan sumber daya yang dihasilkan, dari organisasi dagang kolonial Belanda ke pemerintahan kolonial. Terjadi perubahan yang sangat mendasar bagi kehidupan masyarakat kolonial secara keseluruhan, mulai dari perubahan dari kebijakan ini hingga kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat lokal. Masyarakat Jawa mulai diberi peluang untuk masuk ke dunia pendidikan, bekerja, berorganisasi, dan menjadi anggota parlemen.

Keterbukaan kesempatan tersebut tidak saja diberikan kepada laki-laki dalam keluarga Jawa, tetapi juga mulai diberikan kepada kaum perempuan sesuai. Perempuan juga mengiginkan mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi secara luas dan dalam porsi yang sama. Beberapa program perbaikan kehidupan perempuan pun mulai banyak dihasilkan. Semangat perubahan pun tidak akan berarti apa-apa jika hal ini tidak diimbangi dengan respons yang terbuka pula dari keluarga Jawa. Tampaknya keluarga Jawa sejak lama telah melihat peluang

---

<sup>16</sup>D. H Burger, *Perubahan-perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Bhatara, 1983, hlm. 34.

perbaikan ini. Oleh karena itu respons atas keterbukaan ini pun dilakukan. Terlihat dari perjuangan perbaikan kehidupan masyarakat, termasuk perbaikan kehidupan perempuan di dalam rumah tangga tumbuh secara merata di berbagai wilayah di Jawa.

Organisasi-organisasi perempuan yang bermunculan setelah itu mencantumkan pendidikan sebagai salah satu tugas pokoknya. Organisasi perempuan mulai mendirikan sekolah-sekolah untuk anak gadis. Pada tahun 30-an pergerakan perempuan mulai mencurahkan tenaganya pada pemberantasan buta huruf yang merajalela di tanah air. Usaha-usaha pendidikan yang dilakukan oleh organisasi perempuan tidak hanya ditujukan pada anak-anak, tetapi juga bagi anggota-anggotanya.<sup>17</sup> Berbagai kursus dan perkumpulan mulai dibuka, yang awalnya hanya berkisar pada keterampilan dan keutamaan perempuan, tetapi kemudian meluas dan meliputi pengetahuan umum, bahasa, agama, seni bahkan politik.

Perjuangan perempuan dalam memperoleh pendidikan khususnya yang ada di Jawa Tengah tidak terlepas dari usaha Kartini pada waktu itu. Dia menghendaki agar perempuan Jawa maju, berpendidikan, mandiri, dan mempunyai kedudukan yang terhormat dalam masyarakat. Ia juga memiliki wawasan yang jauh kedepan sehingga sampai saat inipun ide-idenya masih tetap aktual. Ide-idenya itu misalnya pentingnya pendidikan perempuan bagi kemajuan

---

<sup>17</sup>Badan Pusat Wanita Tamansiswa, *Peraturan Besar Wanita Tamansiswa Keputusan Kongres XVI Wanita TamanSiswa*, Yogyakarta : Badan Pusat Wanita Taman Siswa, 1996, hlm. 47.

bangsa, keluarga berencana, kemandirian, kemiskinan, buruh perempuan dan masalah sosial lainnya.

Atas dukungan dan dorongan dari Van Deventer pada tanggal 15 September 1913 dibukalah sekolah Kartini yang pertama di Jomblang, Semarang.<sup>18</sup> Semenjak pendirian sekolah yang pertama itu mulai didirikan sekolah-sekolah sejenis dengan pengantar bahasa Belanda. Antara lain di Pekalongan pada tahun 1917, di Rembang 1918, dan di beberapa kota lain di Jawa Barat dan Jawa Timur. Di samping itu masih banyak sekolah-sekolah putri swasta seperti Dormorini di Blora, Sisworini di Surakarta, dan di berbagai tempat lain.<sup>19</sup> Di samping sekolah Kartini ada juga sekolah Van Deventer yang justru paling mendekati dengan apa yang dicita-citakan Kartini. Di Jawa Tengah berdiri *Van Deventer School* terdapat di kota Semarang tahun 1912-1942 dan di Salatiga tahun 1927-1942. Mata pelajarannya meliputi kerumahtanggan, jahit-menjahit, kerajinan tangan dan ilmu pendidikan.

Pendidikan bagi gadis-gadis semakin mendapat kemajuan. Pada tahun 1918 pemerintah mendirikan *Maisjes kweekschool* di Salatiga. Sekolah ini adalah sekolah guru perempuan satu-satunya diseluruh Hindia Belanda. Murid-muridnya datang dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan lain-lain.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Siti Soemandari Soeroto, *Kartini Sebuah Biografi*, Jakarta: Gunung Agung, 1977, hlm. 408.

<sup>19</sup>Ki Soeratman, "Kartini dan Pendidikan," dalam Aristides Katoppo. *Bunga Rampai Karangan Mengenai Kartini: Satu Abad Kartini 1879-1979*, Jakarta: Sinar Agape Press, hlm. 23.

<sup>20</sup>Lasmidjah Hardi, *Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi. Jilid I*, Jakarta : Sinar Agape Press, 1982.

Sementara itu RAA Surio Sigianto menantu Mangkunegaran V menyarankan perlu diselenggarakannya asrama putri untuk mendukung sekolah-sekolah putri.